

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perbandingan Kinerja Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. dengan menggunakan empat rasio keuangan. Rasio keuangan meliputi: Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja dan pertumbuhan. Berdasarkan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2018-2020 yang memiliki rata-rata lebih tinggi 68.05% adalah kabupaten Jayapura, diikuti oleh kabupaten Merauke sebesar 64.92%, kemudian kabupaten Nduga sebesar 62.57%. Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 52.70%, kabupaten Mamberamo Raya sebesar 50.48%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima pemerintah kabupaten kota diatas mampu memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta kemandiriannya mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi, kemudian tidak hanya bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian dibandingkan dengan dua puluh empat kabupaten, yang termasuk dalam kategori “Konsultatif” menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena kabupaten-kabupaten tersebut sudah sedikit lebih mampu dalam melaksanakan

otonomi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori “Instrukti” kategori tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah yaitu daerah yang tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun dibandingkan dengan kabupaten Mimika dan Kota Jayapura bahwa kedua kabupaten ini memiliki kategori “instruktif” namun kedua kabupaten tersebut mampu melaksanakan otonomi.

2. Berdasarkan Rasio Efektivitas dalam tingkat efektivitas pemerintah Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2018-2020. Dapat disimpulkan bahwa kinerja rata-rata setiap kabupaten yang menunjukkan kategori tidak Efektif yaitu: kabupaten Supiori sebesar 55.49%, kabupaten Waropen sebesar 57.25%, kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 45.64%, kabupaten Asmat 43.00%, kabupaten Lanny Jaya sebesar 36.58% dan kabupaten Nduga sebesar 61.41%. Kemudian rata-rata kabupaten yang menunjukkan kategori Kurang Efektif yaitu: Kabupaten Jayapura sebesar 62.14%, kabupaten Keerom sebesar 77.87%, kabupaten Merauke sebesar 73.78%, kabupaten Puncak Jaya 74,14%, kabupaten Pegunungan Bintang 76.53% dan kabupaten Mimika sebesar 74.30%. Selanjutnya rata-rata kabupaten yang menunjukkan kategori cukup efektif yaitu: kabupaten Yalimo sebesar 89.80%, kabupaten Jayawijaya sebesar 89.55%, dan Kota Jayapura sebesar 82.95%. Selanjutnya rata-rata kabupaten yang menunjukkan kategori Efektif yaitu: kabupaten Sarmi sebesar 99.91%, kabupaten Mamberamo Raya sebesar 92.42%, kabupaten Boven Digoel 96.38%, kabupaten Nabire

sebesar 99.45% dan Kabupaten Paniai sebesar 91.73%. Selanjutnya rata-rata kabupaten yang menunjukkan kategori Sangat Efektif yaitu: kabupaten Biak Numfor sebesar 102.59%, kabupaten Yahukimo sebesar 128.96%, kabupaten Tolikara sebesar 349.43%, kabupaten Puncak sebesar 112.22%, kabupaten Deiyai sebesar 120.76% dan kabupaten Intan Jaya sebesar 145.72%. hal ini menunjukkan bahwa beberapa kabupaten yang memiliki kategori Efektif dan sangat Efektif itu dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah itu dianggarkan dibandingkan dengan kategori Tidak efektif, Kurang Efektif, dan Cukup Efektif.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota.
 - a. Pemerintah Provinsi Papua dan setiap kabupaten/kota di papua diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pemasukan sumber pendapatan asli daerah yang ada dan menambah sumber pendapatan daerah yang baru serta juga mengurangi ketergantungan pemerintah pusat melalui dana transfer.
 - b. Pemerintah Provinsi Papua dan setiap kabupaten/kota diharapkan agar dapat mempertahankan rata-rata efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya dan lebih meningkatkan target penerimaan PAD.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kinerja dan pendapatan setiap kabupaten secara mendalam dan menambah jangkauan penelitian.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penilaian kinerja yang lebih baik.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menyajikan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan asli daerah serta menjelaskan unsur Pendapatan Asli Daerah apa saja yang lebih berpengaruh terhadap penelitian secara rinci.

